JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan
Vol, 5. No, 2. Tahun 2021
e-ISSN: 2597-4440 dan p-ISSN: 2597-4424
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kajian Komparasi Profil Pendidikan Kewarganegaran Sekolah Dasar Di Singapura Dan Indonesia

Muhammad Amin
Program Studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar
Email: muh.amin@unm.ac.id

Abstrak: Tujuan studi untuk menggambarkan profil pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar di negara Singapura dan Indonesia. Studi ini adalah penelitian kepustakaan. Data primer penelitian ini adalah dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan tingkat sekolah dasar yang berlaku di Singapura dan Indonesia, sedangkan data sekunder adalah sumber kepustakaan lain yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis konten. Temuan penelitian ini adalah secara programatik pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar di Singapura dan Indonesia termasuk ke dalam pendekatan *separated* dan dijadikan sebagai program inti mata pelajaran wajib serta punya keunikan tersendiri.

Kata kunci: profil pendidikan kewarganegaraan

Abstract: The purpose of the study is to describe the profile of primary school citizenship education in Singapore and Indonesia. This study is literature research. The primary data of this study is a document of the primary school-level citizenship education curriculum that applies in Singapore and Indonesia, while secondary data is another source of literature that fits the focus of this study. The research data is collected through documentation techniques, then analyzed by content analysis method. The findings of this study are programmatically citizenship education of elementary schools in Singapore and Indonesia included in the separated approach and used as a core program of compulsory subjects and has its own uniqueness.

Keyword: civic/citizenship education profile

PENDAHULUAN

Pendidikan selalu punya peranan penting dalam pembangunan negara-bangsa (*nation state*). Apalagi ditengah globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian, negara membutuhkan warga negara yang baik (*good citizen*) agar dapat memperkokoh kedaulatannya dan meningkatkan daya saingnya dengan negara lain.

Lalu apa hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan? Kennedy (2004) menjelaskan bahwa, secara tradisional, negara-bangsa (*nation-state*) telah menggunakan program pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan dan melindungi identitas nasional/ jati diri bangsa dari kekuatan globalisasi. Sebab, di sebagian besar negara, format pendidikan

kewarganegaraan itu melekat pada mata pelajaran sejarah dan ilmu kewarganegaraan yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dasar mengenai bagaimana cara kerja pemerintah dan institusi lainnya dalam suatu negara serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Kesemuanya itu telah diorietasikan secara lebih meluas pada pengembangan identitas nasional (jati diri bangsa).

Jika ditelaah secara umum, pendidikan kewarganegaraan meliputi proses menyiapkan generasi muda agar kelak mereka mampu berperan dan memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara, dan secara khusus terkait bagaimana peran pendidikan termasuk persekolahan, pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warga negara (Kerr, 1999).

Dengan kata lain, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membekali generasi muda dengan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, watak dan nilai-nilai (*disposition*). Keseluruhan unsur kompetensi itu diyakini akan menjadi bekal bagi warga negara untuk secara sadar ikut berpartisipasi (*civic participation*) dalam membangun dan memajukan bangsa-negaranya sebagai wujud dari tanggungjawabnya sebagai warga negara (*civic responsibility)* (Sapriya dan Wahab 2011; Schulz et al. 2018; Winataputra, 2016)

Dari berbagai kajian ilmiah, perkembangan pendidikan kewarganegaraan selalu berinteraksi dengan perkembangan pemikiran pendidikan demokrasi, perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan global. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan menjadi bersifat multidimensional (Cheng, 1999).

Studi International Civic and Citizenship Education Study (2009) bahwa 21 dari 38 negara (mencakup Asia, Eropa dan Amerika Latin), menemukan, ”… terdapat perbedaan pendekatan dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan yakni sebagai suatu mata pelajaran khusus, mengintegrasikan ke mata pelajaran lain yang relevan dan memasukkan isi pelajar sebagai tema lintas kurikulum. Topik-topik yang diajarkan meliputi berbagai topik, termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga dan konsep politik seperti hak asasi manusia serta topik-topik baru seperti keharmonisan sosial dan masyarakat, perbedaan, lingkungan hidup, komunikasi dan masyarakat dunia (Schulz et al., 2010).

Yang menjadi pertimbangan penulis memilih negara Singapura dan Indonesia, karena kedua negara ini kondisi rakyatnya multi etnis, multi budaya, multi agama dan termasuk dalam lingkungan Asia Tenggara. Masyarakat Singapura dikelompokkan ke dalam empat kelompok ras utama: Tionghoa, Melayu, India dan ras lainnya. Agama yang dianut masyarakat Singapura adalah Budha, Kristen, Islam, Tao dan agama rakyat, Hindu serta agama lainnya. Bahasa resmi yang diakui adalah Inggris, Melayu (bahasa nasional), Mandarin dan Tamil. Meskipun demikian, Singapura telah berhasil mempertahankan hidup berdampingan yang damai di antara populasinya yang beragam. Sebagian besar warga Singapura dari berbagai tingkat etnis memandang bahwa tingkat kerukunan ras dan agama di sana cukup tinggi. Tingkat penerimaan dan kenyamanan orang-orang dari etnis lain dalam kehidupan sosial mereka juga relatif tinggi di berbagai kelompok etnis (Statista Research Department, 2020).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2010) mencatat suku bangsa Indonesia berjumlah $\pm$ 1.331 kelompok suku. Agama yang dianut masyarakat Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (2019) mencatat, jumlah bahasa daerah di Indonesia adalah 688 bahasa (terverifikasi dan termutakhir menurut dialektologi), tetapi punya satu bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia juga telah berhasil mempersatukan rakyatnya yang begitu beragam.

Olehnya itu, kajian tentang profil pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana konteks lahirnya pendidikan kewarganegaraan di Singapura dan Indonesia? Apa yang menjadi landasan pengembangannya? dan bagaimana profil kurikulum pendidikan kewarganegaraan kedua negara tersebut di tingkat sekolah dasar pada abad 21 saat ini? Dari ketiga pertanyaan itu, kita bisa mendapatkan

jawaban tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh negara Singapura dan Indonesia dalam mempersiapkan generasi muda agar kelak mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara pada abad 21 saat ini.

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan mengkaji naskah atau dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar pada negara Singapore dan Indonesia sebagai data primernya, sedangkan data sekundernya berupa artikel jurnal, buku, dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti (*human instrument*) yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, penafsir data dan melaporkan hasil penelitian.

Data dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi yang dilakukan secara bertahap meliputi: pertama, mencari informasi yang mendukung topik penelitian. Kedua, *editing* yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh, utamanya kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian makna satu sama lain. Ketiga, *organizing* dan analisis yaitu, mengelompokkan data yang diperoleh, membaca dan membuat catatan penelitian untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklasifikasi dan mengklarifikasi data yang telah didapatkan. Keempat *finding* yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasi data dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah (Zed, 2008)

Selanjutnya, data dianalisis dengan metode *content analysi*s dan menjaga validitas data digunakan kategori: (1) kredilitas yakni analisis data dan interpretasi data membutuhkan konsisten satu sama lain; (2) kebergantungan yaitu hasil rekam jejak data penelitian dapat ditelusuri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dipaparkan sebagai berikut: Pertama, konteks lahirnya pendidikan kewarganegaraan: Di Singapura, pendidikan kewarganegaraannya selalu menjadi agenda dalam sistem pendidikan. Dinamika kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan politik serta kepentingan bangsa Singapura turut serta mempengaruhi perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Berikut ini uraiannya (Lee, 2012):

- *Ethics* (1959), alasan dimunculkan mata pelajaran ini adalah untuk membangun bangsa yang baru, melalui pembinaan warga negara untuk menjadi individu yang menghormati dirinya sendiri, warga negara yang baik, punya kebiasaan serta berperilaku yang baik dan punya kemampuan untuk menegakkan keadilan dan menghormati hukum dan ketertiban (Sim & Print, 2005)
- *Civics* (1967), merupakan bagian dari kurikulum sejarah dan goegrafi. Orientasi dari *civics* ini mengajarkan tentang konstitusi, legislasi dan hubungan internasional, dan nilai patriotism, loyalitas dan kesadaran warga negara. Alasan mata pelajaran *civics* dimunculkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial warga negara dan cinta kepada negara dan masyarakatnya dan untuk merespon ketegangan konflik ras akibat dari ketidakstabilan politik untuk membangun bangsa yang baru (Sim & Print, 2005)
- *Education fo Living* (1973), diperkenalkan di sekolah dasar yang terintegrasi dengan mata pelajaran *civics*, sejarah dan geografi. Alasan diajarkanya mata pelajaran ini sebagai refleksi dari perhatian pemerintah pada awal kemerdekaan Singapura, yakni mengembangkan jati diri bangsa pada diri anak-anak untuk memperkuat ikatan solidaritas, memastikan kelangsungan dan keberhasilan negara.
- *Review of the Moral Education* (1978), muncul sebagai respon pemerintah untuk menjawab kebutuhan zaman dengan menekankan perlunya mengajarkan nilai-nilai yang dipandang perlu untuk menjamin kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi rasa memiliki, menghormati warisan budaya, cinta tanah air, membangun bangsa. Sedangkan, moral yang diajarkan dan dikembangkan meliputi, integritas, kehormatan, kesetiaan, displin diri,

kebaktian, menghormati orang lain dan toleransi.

- Sebagai tindak lanjut dari *review of moral education* (1978), maka pada tahun (1991), muncul dua program baru mata pelajaran yakni *Good citizen dan Being and Becoming Citizen.* Adapun program mata pelajaran *Good Citizen* didesain untuk sekolah dasar (*primary level*) dan mengadopsi pendekatan didaktik (*didactic approac*h). Sementara itu, program mata pelajaran *Being and becoming*, didesain untuk jenjang sekolah menengah (*secondary level*) dan mengadopsi pendekatan klarifikasi nilai-nilai (*value clarification approach*). Kedua program tersebut mengajarkan nilai-nilai (rasa memiliki, menghormati warisan budaya, cinta tanah air, membangun bangsa) yang diyakini dapat memperkuat tanggung jawab warga negara untuk kesukesaan ekonomi kelangsungan hidup Singapura untuk menghadapi westernisasi.
- *Religious Knowledge* (1984), diperkenalkan untuk menggantikan *Civics* pada jenjang tingkat menengah atas (*upper secondary*) sebagai mata pelajaran wajib. Porgram ini mengajarkan pengetahuan keagamaan (*Biblical*, Budha, Hindu, Islam, *Sikh*, *Confusian Ethic*). Namun, dalam proses pelaksanaannya ditemukan bahwa pengajaran nilai-nilai agama meningkatkan semangat beragama dan sulit bagi sekolah untuk mencapai pengaruh yang menetralkan agama. Alih-alih mencapai kerukunan umat beragama, ada kecenderungan pemisahan suku dan agama dalam pembelajaran ilmu agama. Akibatnya, program *religious knowledge* tidak lagi bersifat wajib (Sim & Print, 2005), dan alasan lainnya program religious knowledge dianggap tidak tepat diajarkan sebagai mata pelajaran agama, karena Singapura adalah negara sekuler (Henson, 1989).
- *Civics and Moral Education* (1991) muncul menggantikan *religious of knowledge* (1984), harapannya ialah menumbuhkan individu yang dapat memposisikan dirinya dalam masyarakat, hidup harmonis serta berkontribusi secara efektif dalam masyarakat Singapura yang multikultural (Anon, 1990). Untuk mencapai hal itu, maka *civics and moral education* dirancang untuk memperkuat toleransi antar enis dan antar agama, menanamkan rasa tanggung jawab sosial yang lebih mendalam serta menumbuhkan komitmen dan loyalitas yang kuat kepada bangsa. Ada nilai prinsip ideologi nasional Singapura yang dimasukkan dalam silabus *civics and moral education*, dikenal "*shared values*" yaitu menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi, menguatkan keluarga sebagai pondasi membangun masyarakat, menghormati hak-hak individu dan menawarkan dukungan masyarakat, menyelesaikan masalah melalui konsensus, bukan konlik dan kerukunan ras dan agama (Anon, 1991).
- *National Education* (1997), muncul sebagai prakarsa pembangunan bangsa yang ditujukan kepada warga negara melalui pengembangan dan pembentukan pengetahuan, nilai, dan sikap positif dari warga muda Singapura. Orientasinya adalah untuk mengembangkan kohesi nasional, naluri untuk bertahan hidup dan kepercayaan diri tentang masa depan Singapura. Ada empat tujuan dari program *National Education* yaitu; (1) menumbuhkan rasa identitas, kebanggaan dan harga diri sebagai warga Singapura; (2). menceritakan kisah bagaimana Singapura berhasil melawan rintangan untuk menjadi sebuah bangsa; 3. memahami tantangan, kendala, dan kerentanan serta keunikan Singapura yang membuatnya berbeda dari negara lain; 4. menanamkan nilai-nilai inti yang hidup di masyarakat dan keinginan untuk menang, untuk memastikan kesuksesan dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Ministry of Education Singapore, 2021; Sim & Print, 2005)
- *Social Studies* (2001), diajarkan dijenjang tingkat menengah atas (*upper secondary*) yang orientasinya menekankan pada pengetahuan, dan pemahaman tentang isu-isu nasional Singapura yang berkaitan dengan perkembangan sejarah, politik, ekonomi dan sosial. Selain masalah nasional, *social studies* juga membahas masalah regional dan internasional yang dapat atau mungkin mempengaruhi

perkembangan Singapura. Spirit dari program *social studies* ini ialah "berjati diri dalam kehidupan global". Tujuan dari program *social studies* adalah untuk memungkinkan siswa untuk: (1) memahami isu-isu yang mempengaruhi pembangunan sosial-ekonomi, pemerintahan dan masa depan Singapura; (2) belajar dari pengalaman negara lain untuk membangun dan mempertahankan Singapura yang layak secara politik, kohesif secara sosial, dan dinamis secara ekonomi;(3) mengembangkan warga negara yang memiliki empati terhadap orang lain dan yang akan berpartisipasi secara bertanggung jawab dan bijaksana dalam masyarakat multi-etnis, multi-budaya dan multi-agama; (4) memiliki pemahaman yang mendalam tentang takdir bersama dan identitas nasional (Lee, 2012; Ministry of Education Singapore, 2001; Sim, 2001; Sim & Print, 2005) Diharapkan dari keempat tujuan tersebut, para siswa akan lebih mengetahui pencapaian dan keterbatasan Singapura serta memiliki kepercayaan terhadap masa depannya. Dan tentunya akan mempersiapkan mereka untuk mengadopsi peran yang lebih partisipatif dalam membentuk takdir Singapura di abad ke-21.

- *Character and Citizenship Education* (2010, 2011) isinya mengajarkan tentang keterampilan abad 21 dan tiga ide utama yaitu *identity, relationship dan coiches*. (Ministry of Education Singapore, 2014). Arah masa depan pendidikan kewarganegaraan yang diartikulasi dalam kurikulum Singapura adalah membangun kesadaran diri dan moral warga negara yang baik, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan, percaya diri, memiliki semangat hidup, pelajar mandiri yang bertanggung jawab, mampu berkontribusi aktif, menjadi warga negara yang peduli dan berjati diri Singapura, memiliki kesadaran warga negara yang kuat, bertanggung jawab kepada keluarga, komunitas, dan bangsanya, serta mengambil peran aktif dalam meningkatkan taraf hidup orang lain (Ministry of Education Singapore, 2021)

Sementara itu, di Indonesia, perkembangan pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh perubahan sosial politik dan kenegaraan (Sapriya and Wahab 2011), serta kepentingan untuk tetap mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik dari segi nomenklatur maupun subtansinya dapat dilihat sebagai berikut:

- Kewarganegaraan (1957), diperkenalkan dalam bentuk mata pelajaran yang mengajarkan cara memperoleh dan kehilangan kewargaan negara (Sapriya & Wahab, 2011). Disamping itu, juga mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Ketiga mata pelajaran itu berorientasi pada kognitif semata (Cholisin, 2000).
- *Civics* (1959, 1962). Munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga UUD 1945 kembali dinyatakan berlaku dan penerapan demokrasi terpimpin mengakibatkan terjadi pergantian arah politik Indonesia, termasuk bidang pendidikan. Konsekuensinya, terbitlah surat Keputusan Menteri PP dan K No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara mengenai sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia (Sapriya & Wahab, 2011; Sunarso, 2009). Buku yang diterbitkan itu berjudul "*Civics* Manusia Indonesia Baru" dan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (yang memuat lahirnya Pancasila, UUD 1945, manifesto politik (Pidato Presiden 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita), Manipol-USDEK, Pidato Presiden Republik Indonesia dihadapan Sidang Umum PBB berjudul "*to Build A New World*", Amanat Presiden Pembangunan Semesta Berencana. Pada tahun 1962 mata pelajaran *Civics* diperkenalkan di SMP dan SMA. Muatan materinya ialah sejarah pergerakan/ perjuangan rakyat Indonesia, Pancasila, UUD 1945, pidato kenegaraan Presiden dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Metode pengajarannya bersifat indoktrinasi (Cholisin, 2013; Cholisin, et.al., 2016) Tujuan dari program

mata pelajaran *civics* diarahkan untuk pembangunan karakter bangsa Indonesia yang berjiwa patriotik-sosialis dan mendukung Manipol-USDEK. Program *civics* ini bertahan hingga terjadi peristiwa pemberontakan G30 S/PKI 1965.

- Dalam kurikulum 1968, terjadi perubahan nomenklatur *Civics* menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Muatan materi yang diajarkan ditingkat SD tentang pengetahuan kewargaan negara, sejarah Indonesia, Ilmu Bumi. Untuk tingkat SMP diajarkan tentang sejarah kebangsaan, kejadian setelah merdeka, UUD 1945, Pancasila dan Ketetapan MPRS. Dan untuk tingkat SMA diajarkan tentang Pasal-pasal UUD 1945 yang dikaitkan dengan tata negara, sejarah, ilmu bumi dan ekonomi (Cholisin et al., 2016; Sunarso, 2009). Tujuan Program pendidikan kewargaan negara ialah pembentukan mental dan moral warga negara yang Pancasilais, mewujudkan isi dan jiwa UUD 1945 dan ketetapan MPRS sebagai ketentuan pelaksanaanya serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisik dalam rangka pembinaan bangsa Indonesia (Sunarso, 2009)
- Tekad dari pemerintahan orde baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen, ternyata mempengaruhi arah perubahan sosial-politik pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai munculnya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Triologi Pembangunan ("stabilitas nasional yang dinamis dan sehat..."). Sebagai tindak lanjutnya, diberlakukan kurikulum 1975, terjadi lagi perubahan nomenklatur pendidikan kewargaan menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (1975-1984). Materi yang diajarkan ialah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila (P4). Program ini diajarkan secara terstruktur dan massive di pendidikan formal dan seluruh lapisan masyarakat (non-formal) melalui penataran P4 yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7-Pusat). Selain itu juga, dihasilan buku paket PMP, menjadi buku pegangan bagi murid dan guru SD, SMP dan SMA. Dengan demikian buku "manusia dan masyarakat baru Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi" (Sunarso, 2009). Tujuannya dari program Pendidikan Moral Pancasila (PMP) adalah membentuk warga negara Pancasilais yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sapriya & Wahab, 2011)
- Kemudian, berlaku lagi kurikulum 1994, nomenklatur Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (1994). Perubahan PMP menjadi PPKn didasari atas dua pertimbangan yaitu: (1) kata "moral" memberikan beban psikologi yang berat bagi guru selalu menjadi pihak yang disalahkan, apabila muncul perilaku peserta didik yang dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial dan dasar-dasar moral; (2) Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional) terjadi lagi perubahan nomenklatur, ditandai dengan munculnya nama mata pelajaran "Pendidikan Pancasila" dan "Pendidikan Kewarganegaraan" (Sapriya & Wahab, 2011) wajib diajarkan pada setiap jenis, jalur jenjang pendidikan. Adapun pendidikan Pancasila berfokus pada moral yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila (P4). Sedangkan "pendidikan kewarganegaraan" berfokus pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara untuk menghasilkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (penjelasan Pasal 39 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Nampak jelas dari ketentuan tersebut, misi dari pendidikan Pancasila adalah pembinaan moral (*moral education*), sementara itu, misi pendidikan kewarganegaraan ialah sebagai pendidikan politik guna membentuk kesadaran politik-hukum warga negara dan bela negara.

- Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional n.d.) bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan kurikulum wajib di setiap jenjang pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA serta pendidikan tinggi. Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut ditegaskan, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan "membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang memliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Muatan materi yang diajarkan bagi pendidikan dasar dan menengah meliputi: persatuan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi (Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2006). Nomenklatur pendidikan kewarganegaraan ini digunakan dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (2004) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTPS) (2006). Berdasarkan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan ke dalam mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan warga negara terhadap status, hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia.
- Dalam perkembangnnya, muncul kurikulum 2013, nomeklatur yang digunakan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diajarkan sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Muatan materinya meliputi: Pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016)

Kedua, landasan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, baik di Singapura maupun di Indonesia ialah didasarkan pada kebutuhan merespon perkembangan zaman dan kepentingan negara untuk menyiapkan warga negara yang baik, demokratis, patriotik dan dapat diandalkan guna menjaga kelangsungan hidup dan memajukan bangsa dan negara.

Misalnya, bagaimana Singapura membangun bangsanya pada awal kemerdekaannya tahun 1965 setelah berpisah dari Malaysia? Kondisi Singapura banyak mengalami kerusakan setelah perang dunia II, rakyatnya dilanda kemiskinan, ketidakstabilan politik, tidak punya sumber daya alam yang memadai, biaya hidup yang cukup tinggi, dan ditambah lagi konflik etnik antara imigran yang masuk (etnis Tionghoa, India) dengan warga pribumi Singapura. Kepemimpinan politik pemerintah Singapura (sosok pemimpin Lee Kwan Yue) yang kuat disertai dengan komitmen-loyalitas dan solidaritas warga negarnya, akhirnya Singapura berhasil membangun kembali bangsanya dan kini menjadi negara maju di Asia. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah, Lee Kwan Yuew yang mewajibkan warga negaranya untuk menabung, program keluarga berencana untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, penghapusan pajak bagi pabrik yang ingin menjadikan Singapura berbasis ekspor, pemberian denda yang tinggi bagi warga negara yang merokok, buang sampah dan meludah disembarang tempat, dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dapat dikatakan, kerja sama, loyalitas, saling percaya antara warga negara dan pemerintah Singapura adalah bagian dari dampak positif kebijakan program pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu, di Indonesia, pada awal kemerdekaannya, mengalami banyak masalah-masalah, baik yang datang dari luar negeri (agresi militer Belanda I dan II) dan dari dalam negeri sendiri (gerakan separatism, korupsi, kolusi dan nepotisme), sehingga mengganggu kestabilan politik, keamanan dan ketertiban kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, tuntutan reformasi (1998-1999) yang terjadi di Indonesia, menuju arah kehidupan yang lebih demokratis, ternyata turut mempengaruhi paradigma bahwa untuk memelihara dan memajukan kehidupan demokratis, karena warga negara perlu diberdayakan, harus turut aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah dibutuhkan pendidikan

kewarganegaraan sebagai agenda politik negara Indonesia guna membentuk mental dan moral warga negara yang patriotik, memiliki rasa cinta tanah air, sadar terhadap peran, hak dan kewajibannya, tanggungjawabnya sebagai warga negara, berjati diri sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, secara programatik, profil pendidikan kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar di Singapura dan Indonesia dilihat pada 5 (lima) aspek yaitu nomenklatur, pendekatan, sifat dan status kurikulumnya, muatan materi dan alokasi waktu pembelajarannya dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Pofil Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar di Singapura dan Indonesia

Negara	Terminologi	Pendekatan	Sifat dan statusnya	Muatan materi	Alokasi waktu
Singapura	*Character and Citizenship Education* (2011)	*Separate*	Wajib bagian dari program inti	*Moral education, values*, tiga isu utama (*identity, relationship, choice*), 21st century skills	60 hours per years (lower primary) 75 hours per years (upper primary)
Indonesia	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (2013)	*Separate*; tematik-terpadu	Wajib bagian dari program inti	Pancasila, norma, aturan, tata tertib, hak dan kewajiban, keberagaman, persatuan dan kesatuan serta moralitas	5 jam per minggu (@35 menit)

Profil pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar di Singapura dan Indonesia punya kesamaan dan keunikan seperti yang termuat pada tabel 1. Kedua negara tersebut menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran khusus, terpisah (*separate*), sifat dan kedudukannya, "wajib" dan menjadi "bagian dari program inti kurikulum". Artinya program pendidikan kewarganegaraan disekolah dasar diajarkan sebagai mata pelajaran mulai dari jenjang kelas I hingga kelas VI. Selain itu juga, perlu diketahui bahwa perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Singapura maupun Indonesia, selalu mendapatkan perhatian yang ketat dari kebijakan pemerintah, mulai dari, pendekatan, sifat dan statusnya, muata materi dan alokasi waktu belajar.

Mr. Heng Swee Keat (Ministry of Education Singapore, 2014) mengemukakan bahwa, "sistem pendidikan Singapura harus...membina warga Singapura yang berkarakter baik, sehingga setiap orang memiliki tekad moral untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk berkontribusi bagi keberhasilan Singapura dan kesejahteraan sesama warga Singapura". Kurikulum *Character and Citizenship education* (CCE) di tingkat sekolah dasar lebih menekankan pada pendidikan moral, mengembangkan rasa identitas dan nilai-nilai inti (seperti menghormati, tanggung jawab, ketahanan, integritas, peduli dan harmonis). Kelima itu diyakini berperan sebagai pedoman bagi peserta didik dalam menjalin hubungan dengan keluarga, teman sebaya, guru dan komunitas tempat mereka tinggal, menuntun untuk melihat antara yang benar dan salah, membuat pilihan-pilihan dengan tanggung jawab, menjadi lebih sadar tentang peran mereka dalam masyarakat. Inilah yang dijadikan sebagai sebagai landasan

fundamental untuk menyatukan warga Singapura yang majemuk, membentuk pribadi warga negara yang berkarakter baik dan berguna bagi bangsa-negara.

Ada tiga gagasan utama diajarkan *Character and Citizenship education* yaitu:

- *Identity,* melibatkan seperangkat nilai dan cita-cita. Peserta didik membutuhkan rasa identitas untuk mencapai pengetahuan diri, bertanggung jawab atas tindakan dan berhubungan baik dengan orang lain.
- *Relationship,* membantu peserta didik menentukan identitas mereka, apa yang mereka bisa perbuat serta bagaimana dan mengapa itu penting bagi orang lain. *Relationship* ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik dan moral peserta didik
- *Choices,* mengungkapkan karakter dan sistem nilai yang dianut. Peserta didik membutuhkan nilai untuk membuat pilihan dan memahami mengapa pilihan tertentu benar atau salah. Pilihan dibutukan untuk membantu peserta didik bertindak atas apa yang mereka yakini benar sesuai nilai-nilai, bahkan ketika menghadapi tekanan dan godaan.

Ketiga gagasan tersebut pada gilirannya akan membentuk tatanan pendukung nilai-nilai inti bagi peserta didik untuk menjalani kehidupannya sebagai pribadi yang berkarakter baik dan warga negara yang berguna dalam dunia yang mengglobal.

Selain, itu *Character and Citizenship Education* mengajarkan kompetensi dan keterampilan abad 21. Adapun kompetensi yang dimaksud ialah kompetensi sosio-emosional, bertujuan agar peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelola emosinya, mampu mengembangkan kepedulian dan atensi mereka terhadap orang lain, bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat, membangun ikatan sosial yang positif serta mampu mengatasi situasi yang menantang dengan cara efektif. Kompetensi sosio-emosional tersebut dikategorikan dalam 5 (lima) domain yang saling berkaitan: (1) kesadaran diri, (2) manejemen diri, (3) kesadaran sosial, (4) menajemen hubungan dan (5) pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Domain kesadaran diri serta menajemen diri berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk memahami dirinya sehingga diharapkan mereka mampu mengelola emosi dan perilakunya. Domain kesadaran sosial dan manejemen hubungan berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam interaksi sosial di lingkungannya. Domain pembuatan keputusan yang bertanggungjawab berkaitan dengan pilihan moral dan etika tentang bagaimana menangani diri sendiri, berinterkasi dengan orang lain dan menghadapi situasi yang menantang.

Sedangkan, keterampilan yang mendukung kompetensi kewarganegaraan tersebut diartikulasi ke dalam 3 (tiga) aspek yaitu literasi warga negara, kesadaran global dan keterampilan lintas budaya. Keterampilan itu memungkinkan peserta didik untuk menjadi warga negara Singapura yang berfungsi secara efektif dan tetap berjati diri.

Learning outcomes character and citizenship education sebagai berikut:

1. Memperoleh kesadaran diri dan menerapkan keterampilan mengelola diri untuk menjadi pribadi yang baik dan efektif
2. Berintegritas, membuat keputusan yang bertanggung jawab dan menegakkan prinsip-prinsip moral
3. Mempoleh kesadaran sosial, dan menerapkan keterampian interpersonal untuk membangun dan memelihara hubungan positif yang didasari rasa saling menghormati
4. Menjadi tangguh dan memiliki kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang
5. Rasa bangga terhadap identitas nasional bangsa, merasa menjadi bagian dari Singapura dan komitmen untuk membangun bangsa
6. Mempromosikan keberagaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat Singapura, kohesi sosial dan hubungan harmoni

7. Peduli terhadap orang lain dan berkontribusi secara aktif dalam upaya membangun masyarakat dan bangsa
8. Merefleksikan dan merespon isu-isu di lingkup masyarakat, nasional dan global sebagai warga negara yang terinformasi dan bertanggung jawab (Ministry of Education Singapore, 2014)

Dari uraian itu, *character and citizenship education* mengusung pengembangan model kewarganegaraan yang multidimensional sebagai berikut:

Dimensi	Fokus
Diri pribadi	Memperkuat identitas diri, kesadaran diri, integritas, tanggung jawab, pribadi yang bermoral dan tangguh
Keluarga	Memperkuat ikatan keluarga, melalui jalinan hubungan yang positif dan kepedulian antar anggota keluarga
Sekolah	membina persahabatan yang sehat, bekerja sama dalam kelompok, peduli terhadap orang lain
Masyarakat	Memahami dan peduli budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar, membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis
Bangsa	Mengembangkan rasa identitas nasional dan membangun bangsa
World	Menjadi warga negara yang aktif dalam dunia global

Di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi sebagai pondasi serta menguatkan kemampuan berinteraksi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis misi suci pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah idealisme pembentukan peradaban dan watak bangsa yang bermartabat, serta warga negara yang cerdas, demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra & Budimansyah, 2012). dan telah dijelaskan Pasal 37 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)… membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Karena itu, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan sebagai pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter.

Selain dijadikan sebagai mata pelajaran wajib, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar menggunakan pendekatan tematik terpadu dengan harapan dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik secara utuh. Dikatakan tematik karena tema menempati posisi sentral, merajut makna dari berbagai konsep dasar yang diajarkan pada setiap mata pelajaran. Dan dikatakan terpadu karena mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, baik secara intradisipliner, interdisipliner, mutlidisipliner maupun transdisipliner.

Karenanya, muatan materi seperti Pancasila, aturan, tata tertib, hak dan kewajiban, keberagaman, persatuan dan kesatuan serta moralitas diajarkan secara tematik-terpadu. Tema-tema yang dimaksud antara lain:

Kelas	Tema
I	Diriku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat dan asri, benda hewan dan tanaman disekitarku
II	Hidup rukun, bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari, aku dan sekolahku serta hidup bersih dan sehat
III	Peduli lingkungan dan indahnya persahabatan
IV	Indahya kebersamaan, peduli terhadap lingkungan hidup, berbagi pekerjaan, pahlawanku, indahnya negeriku, cita-citaku dan tempat tinggalku
V	Peristiwa dalam kehidupan, kerukunan dalam bermasyarakat, bangga sebagai bangsa Idnonesia, sejarah peradaban bangsa Indonesia dan lingkungan sahabat kita

VI	Persatuan dalam perbedaan, organisasi disekitarku dan globalisasi

Sumber: diadaptasi dari Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah Peraturan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 bahwa, kompetensi yang ingin dicapai dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar antara lain:

1. Menunjukkan sikap sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila.
2. Mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol- simbol Pancasila di rumah dan sekolah.
3. Melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila.
4. Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas karakteristik individu, hak dan kewajiban, persatuan dalam keberagaman.
5. Memahami makna simbol-simbol Pancasila di rumah sekolah dan masyarakat
6. Menunjukkan sikap baik sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hak dan kewajibannya, dan bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila.
7. Melaksanakan kerjasama dengan teman dalam kebersamaan dan keberagaman di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar
8. Menjelaskan nilai dan moral Pancasila, makna hak, kewajiban dan tanggung jawab, manfaat Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
9. Menunjukkan sikap kebersamaan dalam keberagaman sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; patuh tata tertib dan aturan; bertanggung jawab dan rela berkorban; semangat bhinneka tunggal ika.
10. Menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Melaporkan secara lisan dan tulisan dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dan moral Pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerja sama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016)

Uraian tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga mengusung pengembangan model kewarganegaraan yang multidimensional:

Dimensi	Fokus
Diri	Beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan percaya diri serta cinta tanah air
Rumah	Membangun rasa kebersamaan anggota keluarga melalui sikap patuh terhadap aturan dan bekerja sama di rumah serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga sesuai nilai-nilai Pancasila
Sekolah	Membangun rasa kebersamaan antara warga sekolah melalui sikap patuh terhadap aturan dan bekerja sama disekolah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah sesuai nilai-nilai Pancasila
Masyarakat	Warga masyarakat yang toleran terhadap keberagaman, mau bekerja sama, menjaga persatuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Bangsa	Menjadi warga negara yang berjiwa nasionalisme dan patriotik berlandaskan Pancasila

Format pendidikan kewarganegaraan yang multidimensional tersebut tentunya berimplikasi pada pendekatan pembelajaran di sekolah dasar yang sifatnya holistik. Dalam arti bahwa, pengajar pendidikan kewarganegaraan perlu dibekali penguasaan dan pemahaman terkait isu-isu sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi yang sedang berkembang, baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Disamping itu, pendidikan kewarganegaraan juga membutuhkan dukungan dari berbagai institusi sosial dan politik, seperti keluarga, komunitas sosial organisasi masyarakat, media sosial guna menguatkan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Konteks lahir dan dinamika perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Singapura maupun Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial budaya, politik kenegaraan. Itulah sebabnya, seringkali pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai agenda politik negara untuk menyiapkan warga negara yang berguna dan diandalkan negara dalam menghadapi tantangan zaman yang penuh ketidakpastian.

Profil pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar di Singapura maupun Indonesia telah berkembang pesat dan mengusung model pengembangan kewarganegaraan yang multidimensional dengan ciri khasnya masing-masing. Ini adalah refleksi dari program pendidikan kewarganegaraan dalam merespon kebutuhan dan perkembangan masyarakat pada abad 21 saat ini. Meskipun demikian, esensi dari program pendidikan kewarganegaraan pada kedua negara itu adalah sangat kental dengan muatan nilai-nilai dan moral yang diyakini sebagai modal dasar bagi pembangunan karakter bangsa.

Studi ini hanya sebatas memberikan gambaran secara konspetual bagaimana profil pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar pada negara Singapura dan Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada kajian empiris lebih lanjut mengenai sejauh manakah kompetensi kewarganegaraan yang telah diperoleh peserta didik di sekolah dasar setelah mengikuti program pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR RUJUKAN

Anon. (1990). Moral Education to Focus on ‘Society before Self. *Newspaper: The Straits Times*, February 25, 18-undefined.

Anon. (1991). Younger Pupils Will Be Taught New Civics Course.”*Newspaper: The Straits Times*, February 24, 13-undefined.

Badan Pusat Statistik. *Mengulik Data Suku Di Indonesia*. Retrieved April 30, 2021 (https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html).

Cheng, Y. C. (1999). *Curriculum and Pedagogy in The New Century Globalization, Localization and Individualization for Multiples Intelligence*. Bangkok: UNESCO-ACEID.

Cholisin. (2000). *IKN-PKN*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.

Henson, B. (1989). RK to Be Replaced Civics. *Newspaper: The Straits Times*, October 7.

Kennedy, K. J. (2004). Searching for Citizenship Values in an Uncertain Global Environment. Pp. 9–24 in *Citizenship Education in Asia and the Pacific: Concepts and Issues*. Vol. 14, edited by W. O. Lee, D. L. Grossman, K. J. Kennedy, and G. P. Fairbrother. Springer Netherlands.

Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparision*. London: Qualification and Curriculum Authority.

Lee, W. O. (2012). Education for Future-Oriented Citizenship: Implications for the Education of Twenty-First Century Competencies. *Asia Pacific Journal of Education* 32(4):498–517. doi: 10.1080/02188791.2012.741057.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri*

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah*. Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah*.

Ministry of Education Singapore. (2001). *The Combined Humanities Subject: "O" Level, Examination Syllabuses for 2002*.

Ministry of Education Singapore. (2014). *Character and Citizenship Education (Primary) Syllabus*. Singapore.

Ministry of Education Singapore. (2021a). "Desired Outcomes of Education ." Retrieved April 15, 2021 (https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/desired-outcomes).

Ministry of Education Singapore. (2021b). "What Is National Education?" Retrieved April 15, 2021 (https://www.moe.gov.sg/programmes/national-education).

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Statistik Kebahasaan 2019* . Jakarta.

Sapriya, & Wahab, A. A. (2011). *Toeri Dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Schulz, W., J. Ainley, J. Fraillon, B. Losito, G. &. Agrusti, and T. Friedman. (2018). *Becoming Citizens in a Changing World IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report*. Springer Nature.

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, F., Kerr, D., & Losito, B. (2010). *ICCS 2009 International Report: Civic Knowledge, Attitudes, and Engagement among Lower-Secondary School Students in 38 Countries*.

Sim, J. B. Y. (2001). The Development of Social Studies in Singapore Secondary Schools. *Teaching and Learning* 22(2):74–82.

Sim, J. B. Y., & M. Print. (2005). Citizenship Education and Social Studies in Singapore: A Nation Agenda. *International Journal of Citizenship and Teacher Education* 1(1):59–73.

Statista Research Department. (2020). "Resident Population in Singapore as of June 2020, by Ethnic Group Statista." Retrieved April 30, 2021 (https://www.statista.com/statistics/622748/singapore-resident-population-by-ethnic-group/#statisticContainer)

Sunarso. (2009). Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Dari Rezim Ke Rezim." *Humanika* 9(1). doi: 10.21831/hum.v9i1.3784.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1(1):15–36. doi: 10.21067/jmk.v1i1.1184.

Winataputra, U. S., & Budimansyah. D.. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori Dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.